

ABSTRAK

Adanya kebijakan otonomi daerah membuat pemerintah desa dituntut kemandiriannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki desa. Termasuk didalamnya Dana Desa. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah desa harus mampu mengelola Dana Desa secara akuntabilitas dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem tata kelola dalam pengelolaan Dana Desa dan untuk menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Rejotengah Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data deskriptif. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah indikator yang digunakan untuk menilai akuntabilitas dan transparansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tata kelola dalam pengelolaan dana desa di Desa Rejotengah telah menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa belum dikatakan akuntabel karena tahap pelaporan pemerintah desa masih belum maksimal diluar dari tahap pelaporan akuntabilitas pemerintah desa sudah bisa dikatakan akuntabel. Transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Rejotengah dicapai melalui penggunaan media yang mudah diakses masyarakat dan sudah bisa dikatakan transparan.

Kata Kunci: Sistem tata kelola keuangan, dana desa, akuntabilitas, transparansi

ABSTRACT

The existence of a regional autonomy policy the village government to be independent in managing the resources owned by the village including the Village Fund. To realize good governance, the village government must to manage the Village Fund in an accountable and transparent manner. This study to determine the governance system in the management of Village Funds an to assess the accountability and transparency of Village Fund management in Rejotengah Village, Deket District, Lamongan Regency. This study used a qualitative approach with descriptive data analysis. Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 is an indicator used to assess accountability and transparency. The results show that the governance system in managing village funds in Rejotengah Village has used the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 and the accountability the village government in managing Village Funds has not been said accountable because the reporting stage of the village government is still not maximal outside of the village government accountability reporting stage can already be said to accountable. Transparency in the management of village funds in Rejotengah Village is achieved through the use of media that are easily accessible to the public and can be said to transparent

Keywords: *Financial governance system, village funds, accountability, transparency.*